

BAB II

HUBUNGAN INDIA DENGAN CHINA DAN PAKISTAN

India adalah negara yang terletak di wilayah Asia Selatan, tepatnya di antara 8° LU - 37° LU dan 68° BT - 97° BT dengan luas wilayah sebesar 3.287.590 km². Dengan luas wilayah tersebut, India menjadi negara terluas ke tujuh di dunia (Pour, 2007). Di sebelah timur, India berbatasan dengan Bangladesh dan Myanmar. Di sebelah barat, India berbatasan dengan Pakistan. Di sebelah selatan, India berbatasan dengan Srilanka, Maladewa, dan Samudra Hindia. Di sebelah utara, India berbatasan dengan China dan Rusia (Adha, 2007, p. 38). India memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah China, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 milyar jiwa. Mayoritas penduduknya adalah ras Kaukasoid yang sering disebut ras Arya. India memakai bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resminya. Penduduk India mayoritas menganut agama Hindu. Dengan banyaknya penduduk yang beragama Hindu mengakibatkan keadaan sosial India tidak terlepas dari sistem kasta, meskipun tidak diterapkan secara formal (Pour, 2007, pp. ix-xi).

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, India tentu ingin menjadi negara yang ikut serta dalam urusan internasional. Oleh karena itu India perlu memperhatikan hal-hal yang vital dalam prinsip bernegara yaitu sistem politik, ekonomi, dan militer. Selain itu, agar dapat ikut serta dalam urusan internasional, India perlu memperhatikan hubungan bilateralnya dengan negara tetangga. Terutama dengan negara yang kemungkinan membutuhkan perhatian yang ekstra karena ada sebab satu dan lain hal seperti masalah perbatasan. Salah satu contohnya yaitu dengan China dan Pakistan. Bab dua ini akan membahas analisis hubungan India dengan China dan Pakistan. Namun sebelum itu akan dibahas secara umum terkait sistem politik,

ekonomi, dan militer India guna menambah pemahaman dalam analisis hubungan India dengan China dan Pakistan. Berikut adalah foto peta perbatasan India dengan China dan Pakistan.

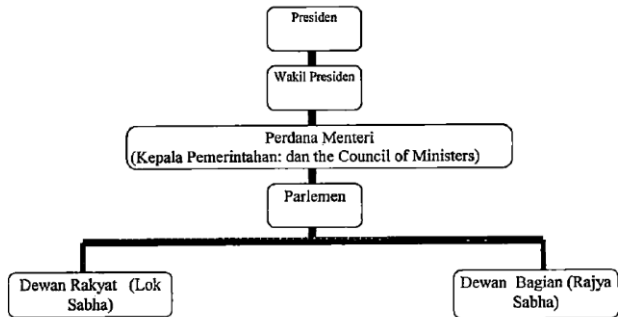


Gambar 2.2 Peta Perbatasan India dengan China dan Pakistan

Sumber : Nursalikhah, Ani. (2017)

A. Sistem Politik India

India merdeka dari Inggris pada tahun 1947 bersama dengan Pakistan. Pada tanggal 26 Januari 1950 India baru saja memproklamlirkan dirinya sebagai negara republik. Dengan bentuk negara republik maka menjadikan presiden sebagai kepala negara atau pemimpin tertinggi di India. Sistem pemerintahan India menganut sistem parlementer, dimana perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam sistem parlementer ini, India memiliki dua kamar yaitu majelis tinggi atau dewan bagian atau *Rajya Sabha* dan majelis rendah atau dewan rakyat atau *Lok Sabha*. Berikut adalah gambar struktur pemerintahan India dalam buku yang berjudul *Government and Politics in South Asia* milik Craig Boxter dan kawan-kawan. (Adha, 2007, pp. 40-41)



Gambar 2.3 Struktur Pemerintahan India

Sumber: Boxter, C., et all. (1987, hlm. 79)

Setelah merdeka dari Inggris, tampuk kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India pertama. Meskipun sebelumnya beliau tidak memiliki pengalaman untuk memimpin sebuah negara, namun beliau dipercaya untuk menjabat sebagai pemimpin tertinggi di India. Untuk itu beliau perlu memiliki negara panutan sebagai percontohan agar dapat segera mengembangkan negaranya terutama dalam hal ekonomi yang telah tertinggal jauh dari negara-negara lain. Pada waktu itu Amerika Serikat sedang terfokus kepada Eropa, Jepang, dan *Marshall Plan* sehingga Nehru mengalihkan perhatiannya ke arah Rusia untuk belajar ekonomi. Beliau pun mengirimkan timnya untuk belajar ekonomi di Moskow. Dengan belajar ekonomi negara lain, harapannya mereka dapat kembali ke India guna menerapkan ilmu yang mereka peroleh ketika belajar di sana. Semenjak itu, ekonomi India menggunakan model pembangunan Nehru yang lebih mengacu pada model pembangunan ala Rusia yang pusat kontrolnya pada pemerintah. Namun model pembangunan Nehru hanya bertahan sampai tahun 1990 saja karena dianggap tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti yang diharapkan masyarakat India (AZ, 2012, p. 35).

Sejak Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menjabat, arah politik luar negeri India selalu melihat ke timur atau yang kita kenal sebagai kebijakan '*Look East*'. Kebijakan ini dikeluarkan dengan harapan agar India menjadi negara yang kuat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 1990-an. Kebijakan '*Look East*' adalah sebuah kebijakan yang berupaya untuk menumbuhkan hubungan dengan negara lain baik dari sisi ekonomi maupun dari segi strategis lainnya ke arah timur India. Dalam hal ini adalah wilayah Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai pusatnya (Tjoa, 2018).

Namun, sejak tahun 2014 Perdana Menteri Narendra Modi menjabat, India mulai meningkatkan arah kebijakan politik luar negerinya menjadi '*Act East*'. Hal ini diungkapkan beliau dalam pidatonya dalam KTT Asia Timur di Myanmar pada bulan November 2014. Setelah dinaikkan levelnya menjadi '*Act East*', kini India tidak hanya melihat Asia Tenggara saja namun juga diperluas wilayahnya menjadi ke arah Asia Timur dan Pasifik Selatan guna memperdalam kerjasama ekonomi, membuat kerjasama keselamatan, dan kerjasama baru lainnya yang dapat mendukung pembangunan nasional India. Pada tahun 2017, India lebih sering menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia serta sering melakukan operasi di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Tjoa, 2018).

Meskipun arah politik luar negeri India baik pada masa Nehru sampai sekarang masa Modi selalu melihat ke arah timur, namun bukan berarti India beraliansi secara penuh atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara di timur India. Hal ini karena sejak India merdeka, India telah berkomitmen penuh untuk tidak memihak ke dalam suatu blok-blok yang sedang bertarung pengaruh di dunia internasional. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sejak awal kemerdekaan, India selalu menegaskan gerakan tidak memihak atau *non-block*. Komitmen ini muncul atas dasar sejarah India yang pernah mengalami masa penjajahan oleh

Ingggris. Oleh karena itu, India tidak mempercayai negara atau blok negara manapun di dunia ini secara penuh.

Sikap non-blok yang ditunjukkan oleh India, telah membawa India menjadi pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara dunia ketiga di kawasan benua Asia dan Afrika. Bagi India, keikutsertaan India dalam GNB berdasarkan prinsip-prinsip yang sejak dulu diterapkan Partai Kongres di India. Prinsip-prinsip tersebut yaitu mengenai upaya dalam menciptakan perdamaian dunia, kemerdekaan semua bangsa, persamaan ras, dan penghapusan segala bentuk kolonialisme dan imperialisme khususnya bagi bangsa-bangsa mayoritas negara dunia ketiga berasal yaitu Asia dan Afrika. Sikap *non-block* India bukan berarti membuat India anti dengan negara lain, terutama negara di luar negara dunia ketiga. Namun sikap non-blok ini, membuat India lebih berhati-hati dalam menentukan sikap terhadap negara lain. Terutama dalam hal menjalin kerjasama dan aliansi dengan negara lain (Adha, 2007, p. 42).

B. Ekonomi India

Pada awal kemerdekaan sekitar 70% perekonomian India ditopang oleh sektor pertanian dengan hasil terpentingnya yaitu padi, gandum, jagung, biji minyak, tebu, tembakau, kapas, yute, teh, dan kopi. Bahan tambang yang dimiliki India adalah batu bara, bijih besi, mangan, bauksit, torium, mika, magnesium dan minyak bumi (Sari K. Y., 2008, p. 16). Model pembangunan ekonomi yang dipakai kala itu adalah model pembangunan *Nehruvian* atau pembangunan model Nehru, yang merupakan perdana menteri pertama India Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru. Model pembangunan ini berpusat pada pemerintah, mirip seperti sistem komando terpusat atau sosialis yang dianut Uni Soviet pada waktu itu. Jadi semua sistem ekonomi harus dibawah kendali penuh pemerintah. Dalam sistem ini juga mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak swasta. Peran swasta sangat dikontrol secara ketat oleh pemerintah.

Selain itu, untuk masalah dengan dunia luar, dalam hal ekonomi pemerintah pada waktu itu menerapkan kebijakan proteksionis dan industri substitusi import. Akibat dari hal ini muncul istilah *Hindu Rate Growth* yang menggambarkan tentang rendahnya pertumbuhan ekonomi India kala itu yaitu pada tahun 1950-1990 (Iberahim, 2013, p. 3).

Model pembangunan Nehru ini tidak terlepas dari pengaruh sejarah India yang pernah merasakan zaman penjajahan oleh Inggris. Sehingga pada waktu itu India sebisa mungkin meminimalisir peran swasta atau orang asing dalam tata perekonomiannya dan menerapkan pemikiran Mahatma Gandhi yaitu semangat *swadesi*. Semangat ini menegaskan untuk selalu berupaya menahan diri dan menggunakan kemampuan yang ada pada diri sendiri, sehingga munculah pembangunan berbasis industri substitusi *import* (Iberahim, 2013, p. 5).

Dikarenakan model pembangunan Nehru ini tidak membuat perekonomian semakin membaik, ditambah dengan adanya krisis ekonomi di seluruh dunia pada tahun 1991, maka munculah reformasi ekonomi India pada tahun 1991 secara menyeluruh dengan mengadopsi sistem ekonomi pasar yang berlandaskan pada prinsip liberalisasi ekonomi. Reformasi ini berawal dari bergabungnya India dengan IMF (*International Monetary Fund*) karena India tidak memiliki jalan keluar lain selain melakukan perjanjian dengan IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang dihadapinya. Adanya perjanjian dengan IMF dan organisasi lain, membuat India harus melakukan sejumlah hal sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari mereka. Beberapa hal yang perlu dilakukan India adalah melakukan liberalisasi secepatnya, mengurangi regulasi pemerintah terutama dalam hal perdagangan internasional, menghapuskan hambatan bagi pendirian usaha, dan dibukanya area baru untuk usaha swasta (Syahira, 2016, p. 2).

Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri PV Narashima Rao, India semakin mempromosikan reformasi ekonomi mereka yaitu dengan mengubah pola pembangunan yang semula pasif dan tertutup terhadap dunia internasional menjadi aktif dan terbuka bagi negara-negara lain atau investasi asing yang ingin menanamkan modalnya di India. Beliau juga menerapkan pembangunan pro pasar yang membawa pertumbuhan ekonomi bagi India, terutama dalam hal perdagangan yaitu ekspor-impor. Pada tahun 2001 – 2005 ekspor India naik sebesar 28% dan impor sebesar 30,3% dibandingkan dengan tahun 1978 – 2001 yang hanya sekitar 9,1% dan 8,3% (Syahira, 2016, p. 4).

Pada akhirnya reformasi ini membawa kebaikan bagi perekonomian India yang telah lama lesu. Sehingga belum lama dilakukannya reformasi ini, India telah berhasil membawa perekonomiannya bangkit dengan alat utamanya yaitu ilmu pengetahuan teknologi informasi. Teknologi informasi di India telah membawa India ke dalam tiga hal besar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong terciptanya pemerintah yang baik (Iberahim, 2013, pp. 5-6).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di India telah menempatkannya sebagai negara maju. Bahkan koran *The Wall Street Journal* menyatakan bahwa kinerja perusahaan *high-tech* di India telah menumbuhkan rasa percaya diri para pengusaha dan juga menyingkirkan pengaruh birokrat dan politikus yang selama ini telah menjadi pusat kontrol ekonomi India. Reformasi ini juga didukung dengan adanya kebebasan pers yang turut membantu penyebaran informasi yang diperlukan (Pour, 2007, pp. 5-7). Berkat adanya reformasi ekonomi ini, India tumbuh menjadi negara raksasa dengan kekuatan ekonomi baru yang patut diperhitungkan di tengah pertarungan pengaruh kekuatan ekonomi negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan China.

Pertumbuhan ekonomi India terus meroket sejak reformasi ekonomi pada tahun 1991. Bahkan pada tahun 2014, Bank Dunia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi India pada level 7,42 % melewati pertumbuhan ekonomi China yang hanya pada level 7,5 persen. Pada tahun 2014 India berada di masa kepemimpinan Perdana Menteri Naredra Modi. Beliau sangat optimis terhadap pertumbuhan ekonomi India yang akan terus meroket tahun demi tahun. Hal ini didukung dengan adanya jumlah penduduk India yang mencapai 1,3 milyar, pesatnya urbanisasi, jumlah universitas yang ekselen, dan sektor jasa yang menguat dengan banyaknya perusahaan lokal yang tampil apik di dunia Internasional. Sehingga dapat menciptakan peluang-peluang yang positif bagi pertumbuhan ekonomi India di masa depan (Republika.co.id, 2015).

Pertumbuhan ekonomi India yang kian lama kian positif membuat negara-negara lain mulai memperhitungkan India di tengah kancah ekonomi global. Tak terkecuali Amerika Serikat yang ingin memperkuat kerjasama ekonomi dengan India. Amerika Serikat yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Barack Obama melihat bahwa pertumbuhan ekonomi India sangat signifikan dan mampu terlepas dari belenggu krisis global. Pada pertemuan G20 kala itu, Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa untuk menciptakan stabilitas ekonomi global membutuhkan banyak syarat. Bukan hanya modal saja, tetapi juga usaha untuk memobilisasi tenaga kerja serta memperbaiki keterampilan mereka. Beliau juga mengatakan kepada para pebisnis dan investor untuk tidak hanya mempekerjakan kaum laki-laki saja, tetapi juga perempuan dan anak-anak muda (Republika.co.id, 2015).

Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi India tidak lancar seperti yang diprediksi oleh banyak pihak. Pada bulan November 2016, Perdana Menteri Modi mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan peredaran uang kertas *rupee* dengan pecahan tertinggi. Kebijakan ini dinamakan kebijakan demonetisasi yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik

peredaran uang kertas 1000 dan 500 *rupee* seri pecahan Mahatma Gandhi sebagai alat pembayaran kegiatan ekonomi sehari-hari (Irfan, 2017). Kebijakan ini dikeluarkan beliau untuk melawan korupsi dan penghindaran pajak. Selain itu kebijakan ini juga telah melenyapkan sekitar 86% uang tunai di negara India. Padahal mayoritas ekonomi India masih banyak menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi. Akibat dari kebijakan demonetisasi ini pertumbuhan ekonomi India pada kuartal I tahun 2017 mengalami perlambatan menjadi 6,1% saja yang sebelumnya pada kuartal IV tahun 2016 mencapai 7%. Kemudian pada bulan April-Juni 2017 pertumbuhan ekonomi India hanya sebesar 5,7% jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi India pada tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu sebesar 7,1 % (Setiawan S. R., 2017).

C. Militer India

Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat membuat suatu negara perlu untuk mengembangkan kekuatan militernya, tak terkecuali India. Sejak reformasi tahun 1991, ekonomi India tumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi pun semakin tinggi dan menjadi sektor utama penunjang ekonomi India. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya negara yang mulai memperhitungkan India dari segi teknologinya. Bahkan negara maju sekelas Amerika Serikat pun telah mengakuinya, hal ini terlihat dari banyaknya ekspor *software* India ke Amerika Serikat.

Perkembangan teknologi informasi tentu saja mendukung perkembangan teknologi militer. Semakin canggih teknologi militer suatu negara membuat negara lain juga perlu mengembangkan militernya guna menghindari ancaman yang mungkin muncul akibat tingginya teknologi militer yang dimiliki negara lain. Hal ini menyebabkan terjadinya perlombaan kekuatan militer antar negara. India sebagai negara yang tengah merintis kekuatannya untuk menghadapi

konflik dengan negara lain terutama dalam hal perbatasan, tentu membutuhkan kekuatan militer yang kuat untuk mendukung kepentingan nasionalnya terutama dalam menjaga wilayah teritorialnya dari serangan pihak lawan.

Untuk meningkatkan kualitas militernya, salah satu yang perlu dilakukan India adalah menjalin kerjasama dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Italia, dan Israel. India sering membeli senjata kepada Rusia yang dinilai relatif lebih murah dibanding negara penghasil senjata lainnya. Selain itu Rusia juga menawarkan adanya transfer teknologi kepada negara mitra yang mau melakukan kerjasama dengannya. Oleh karena itu India lebih memilih untuk membeli senjata Rusia. Tidak hanya membeli senjata buatan Rusia, India juga bekerjasama dengan Rusia, dalam pembuatan pesawat jet tempur yang harga per unitnya sebesar US\$ 100 Juta. Alasan Rusia melakukan pertukaran teknologi dengan India adalah karena India merupakan sasaran pasar senjata utama bagi Rusia. Bahkan India dan Rusia pernah berhasil mengembangkan program kapal anti rudal permukaan bernama Brahmos dan pengembangan kapal induk berteknologi nuklir yang dipesan India pada tahun 2004 (Subekti, 2012, pp. 5-6). Dengan adanya alih teknologi dengan Rusia membuat India mulai bisa belajar untuk mengembangkan teknologi militernya dan berusaha untuk merakit senjatanya sendiri.

Semakin tingginya pertumbuhan ekonominya, India semakin berani dalam meningkatkan kekuatan militernya. Apalagi ditambah dengan kebijakan '*Act East*' yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Modi. Peningkatan kekuatan militer India juga tidak lepas dari masalah perbatasan yang sering menghampiri India. Terutama masalah perbatasan dengan China dan Pakistan. Untuk itu peningkatan kekuatan militer adalah salah satu cara India melindungi kepentingan nasionalnya yang berguna untuk melindungi wilayah negara. Salah satu usaha India dalam hal penguatan militernya yaitu

pada bulan Maret 2016, India merancang *blue print* untuk mengalokasikan US\$ 3 Milyar untuk membeli drone 5000 buah dalam waktu sepuluh tahun ke depan. Drone ini digunakan untuk melakukan pengawasan di perbatasan yang rawan konflik (Tjoa, 2018).

Sepanjang tahun 2017, kekuatan militer India tengah menjadi sorotan dunia. Pada bulan Juli 2017 di Paris *Air Show*, India membeli pesawat jet tempur F-16 buatan Lockheed Martin senilai US\$ 10 Milyar. Kemudian, Perdana Menteri Modi berkunjung ke Amerika Serikat dan membeli 22 pesawat Reaper yang harganya melebihi US\$ 90 Juta. Pada tanggal 27 Desember 2017 India telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk memasok sistem S-400. Para ahli mengatakan bahwa 70% alutsista milik India berasal dari impor (Tjoa, 2018).

Dari segi jumlah tentaranya, pada tahun 2017 dengan total jumlah penduduk India yang mencapai 1,2 milyar jiwa, India memiliki 4,207,250 tentara aktif dan cadangan yang termasuk dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. India memiliki total 2,102 pesawat, 676 pesawat tempur, 4,426 tank, 295 kapal, dan total anggaran militer senilai US\$ 51 milyar. Dengan jumlah ini India menduduki posisi ke empat dalam hal kekuatan militer setelah Amerika Serikat, Rusia, dan China (Woody, 2018).

Selain pengembangan senjata dan militer, India juga mengembangkan teknologi nuklir. India mulai mengembangkan nuklir pada tahun 1944. Sekitar tahun 1950 India mulai mengembangkan reaktor nuklir. India melakukan uji coba nuklir yang pertama pada tanggal 18 Mei 1974 dengan tujuan awalnya bukan untuk senjata, melainkan untuk "*Peaceful Nuclear Explosion*" atau uji coba nuklir untuk tujuan damai yaitu untuk membuat tenaga listrik. Namun sayangnya, dunia internasional merespon uji coba nuklir tersebut dengan berbagai macam respon negatif. Terutama

negara-negara tetangga di kawasan Asia Tengah. Paska uji coba tersebut, India sempat menghentikan sementara uji coba nuklir yang telah direncanakan. Namun pada tahun 1980-an sampai 1990-an India memulai pengembangan nuklirnya kembali. Kali ini India mulai mencoba membuat nuklir tersebut menjadi senjata yang berupa *thermonuclear* atau yang sering disebut sebagai sistem perlucutan senjata nuklir. Hal ini dilakukan India agar nuklir dapat dijadikan alat untuk mencapai stabilitas keamanan kawasan yang dikhawatirkan akan terganggu karena adanya konflik dengan negara lain seperti China dan Pakistan. Kemudian pada tahun 1989 India melakukan pengembangan nuklir untuk jarak pendek dan menengah. Sekitar tahun 1994 India mampu melepaskan senjata nuklirnya melalui pesawat tempur. Kemudian pada tahun 1996 India mampu menciptakan peledak nuklir yang kemampuannya melebihi *ballistic missile* (Aeni, 2017, p. 3).

Perkembangan nuklir India tidak sampai disitu saja, pada tahun 2011 – 2015 India terus mengalami perkembangan dalam hal nuklir. Pada tahun 2011, India melakukan uji coba Agni II yang memiliki jarak mencapai 2000 km dan Agni IV dengan jarak 3500 km. Pada tahun 2012 India berhasil mengembangkan ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) dengan jarak jelajah kisaran 3000-5000 km. Kemudian pada tahun 2013 India meluncurkan Agni V di Pulau Odisha. Hingga tahun 2015 India telah memiliki pesawat tempur 1.905 buah, senjata nuklir sekitar 90-100 buah, dan kapal induk 2 buah. Perkembangan nuklir India diikuti dengan dibentuknya kerjasama antara India dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara lain. Dalam kerjasama tersebut India dapat belajar dan berkoordinasi dalam mengembangkan nuklirnya (Aeni, 2017, p. 3).

D. Dinamika Hubungan India Dengan China

India dan China adalah negara yang memiliki pengaruh kuat sejak dulu jauh sebelum istilah negara bangsa ada. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh budaya mereka yang

tersebar ke penjuru dunia sebelum adanya perang dunia. Pada tahun 402 SM seorang pendeta dari China bernama Fa Xian pergi ke India dan menetap untuk waktu yang lama. Setelah kembali ke China, dia menerjemahkan beberapa teks berbahasa sanksekerta ke bahasa mandarin. Setelah itu, banyak orang-orang China yang pergi mengunjungi India, dan begitu pula sebaliknya orang India datang ke wilayah China. Akibatnya terjadilah pertukaran budaya, agama, dan kebiasaan di antara keduanya. Salah satu hal yang membuktikan adanya pertukaran budaya adalah masuknya pengaruh ajaran Budha di China (Hossain, 2018).

Pada masa pemerintahan Inggris, India dan China memiliki hubungan yang baik. Bahkan India mengirimkan lima tenaga medisnya untuk membantu China yang pada saat itu sedang mengalami Perang China – Jepang yang kedua. Setelah India dan Pakistan merdeka pada tahun 1947 dan pada tahun 1949 China dibawah kekuasaan Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat China, India adalah salah satu dari beberapa negara yang ikut serta mengakui berdirinya RRC (Hossain, 2018). Padahal pada waktu itu, negara-negara di dunia banyak yang membenci komunisme. Namun India beranggapan bahwa China dapat diajak untuk bekerjasama mendirikan Pan – Asia dan mengalahkan sifat kolonialisme barat yang tengah merajalela.

Setelah kedua negara merdeka, pada tahun 1954 India dan China menandatangani perjanjian persahabatan yang bernama *Panchsheel Treaty* di Tibet. Isi perjanjian ini adalah komitmen kedua negara untuk melaksanakan prinsip hidup berdampingan antara kedua negara dengan damai. Namun sayangnya perjanjian ini tidak berjalan lama, hal ini dikarenakan China ingin mengembalikan wilayahnya yang selama masa penjajahan mengalami perpecahan. Dalam usaha menyatukan kembali wilayah yang dianggap China sebagai kekuasaannya, menimbulkan pertentangan dengan negara tetangga China. Termasuk India yang sebagian wilayahnya

diklaim sebagai wilayah China. India mengeklaim wilayah yang dipersengketakan dengan China atas dasar aturan *Mac Mohan line* yang dibuat oleh Inggris, sedangkan China tidak mengakuinya karena China mengeklaim berdasarkan sejarah panjang China. Wilayah yang dipersengketakan India dan China ada di wilayah Tibet (Adha, 2007, p. 63).

Sejak saat itu, hubungan India dan China mengalami banyak konflik. Bahkan pada tahun 1962 terjadi perang antar kedua negara tersebut. Pada bulan September – Oktober di perbatasan wilayah India dan Tibet tepatnya di Sikkim, Nepal dan di Ladakh terjadi pertempuran yang cukup keras. Tentara RRC menyerang pos-pos tentara India di perbatasan tersebut. Meskipun India mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat, namun di wilayah Ladakh, India mengalami kekalahan. (Adha, 2007, p. 65) Perang ini diakhiri dengan kekalahan India yang menewaskan beberapa prajurit penjaga perbatasan.

Paska perang, India dan China mengalami fase dimana hubungan mereka terus diwarnai dengan kecurigaan dan persaingan. Keduanya saling memperebutkan pengaruh di forum internasional. Pada waktu itu, India semakin mendekati diri dengan negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat guna mengantisipasi sikap China yang sewaktu-waktu dapat menjadi agresif. India juga mencari simpati di forum-forum internasional tak terkecuali di negara-negara *non-block*. China sendiri juga sama seperti India yaitu berusaha membuat citra India buruk di mata Internasional. Selain itu China menjalin hubungan yang sangat dekat dengan negara saingan India yaitu Pakistan. China mulai membantu Pakistan dengan mengirimkan bantuan militer, tenaga nuklir dan kapal-kapal militer guna untuk meningkatkan kekuatan Pakistan dalam konflik melawan India (Adha, 2007, p. 67).

Meskipun ketegangan di antara India dan China masih tinggi, namun pada tahun 1976 kedua negara mulai memperbaiki hubungan diplomatiknya. Kedua negara saling

menempatkan kedutaan dan duta besarnya di masing-masing negara. Pada tahun 1977 kedua negara telah membuka hubungan dagang meskipun hanya melalui jalur laut. Pada tahun 1988, Perdana Menteri Rajiv Gandhi berkunjung ke China guna membangun hubungan yang baik dengan China. Dalam kunjungan ini menghasilkan tiga perjanjian yaitu pertukaran kebudayaan, teknologi udara China India, dan ilmu pengetahuan (Adha, 2007, p. 70). Pada tahun 1996 Presiden RRC Jiang Zemin berkunjung ke India guna melakukan upaya penyelesaian perbatasan. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 2006, Perdana Menteri RRC Wen Jiabao menindaklanjuti kunjungan China yang pertama dan lebih serius dalam membahas upaya penyelesaian masalah perbatasan (Adha, 2007, p. 71). Hubungan pertikaian masalah perbatasan pada masa ini mengalami titik terang ketika kedua negara menghadiri upacara pembukaan jalur dagang Nathu-La di wilayah Sikkim yang disertai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pendidikan dan ekonomi di antara kedua negara. Adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa China telah mengakui wilayah Sikkim sebagai bagian dari wilayah India (Adha, 2007, p. 72).

Hubungan kedua negara terkait perbatasan terus mengalami pasang surut. Diantaranya pada tahun 2013, ketegangan di antara kedua negara kembali muncul akibat aksi tentara China yang berkemah dekat dengan perbatasan. Hal ini memicu reaksi India yang segera mengambil sikap antisipatif. Namun ketegangan ini mereda setelah dilakukannya diplomasi yang intensif antar kedua negara dan membuat kedua negara menarik mundur pasukannya ke posisi masing-masing (Parischa, 2013).

Kemudian pada tahun 2017 ketegangan kembali muncul. China menuduh tentara India telah memasuki wilayah China di perbatasan antara kedua negara. Tentara India tersebut dinilai mengganggu pembangunan jembatan di wilayah Donglang, China yang bersebelahan dengan wilayah

Sikkim, India. Panjang wilayah yang selama ini menjadi sengketa kedua negara yaitu 3.500 km. Namun kedua negara pun menyelesaikan ketegangan ini secara diam-diam atau diplomasi senyap (Arungbudoyo, 2017).

Disamping masalah perbatasan, hubungan kedua negara juga disertai dengan upaya peningkatan hubungan ekonomi. Mengingat kedua negara sadar akan kekuatan ekonomi masing-masing dan lawan yang dapat memunculkan potensi kerjasama yang baik antar kedua negara. Apalagi kedua negara terkenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas. Selain itu kedua negara juga sedang berusaha membangkitkan ekonomi masing-masing guna mendapatkan pengaruh yang besar di dunia internasional.

E. Dinamika Hubungan India Dengan Pakistan

India dan Pakistan sebelum merdeka dari Inggris adalah satu negara. Sebelum merdeka, Inggris memberikan kedaulatan bagi masyarakat muslim yang pada waktu itu diwakili oleh Liga Muslim untuk mendirikan negaranya sendiri terlepas dari India yang diberi nama Pakistan. Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka beragama Islam, sedangkan India mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kedua negara tersebut merdeka dalam waktu yang hampir bersamaan. Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947 dan India pada tanggal 15 Agustus 1947. Akibatnya negara yang tadinya satu wilayah ini harus dibagi menjadi dua bagian.

Masalah kemudian muncul diantara kedua negara yaitu tentang perebutan wilayah Kashmir. Kashmir adalah wilayah yang mayoritas beragama Islam, namun dipimpin oleh orang beragama Hindu. Dari sini muncul masalah ketika Pemimpin Kashmir Maharaja Hari Singh memecat dan mengganti tentara Poonch dengan tentara Hindu. Penggantian ini menyebabkan terjadinya pemberontakan yang puncaknya terjadi pada 21 Oktober 1947 dan disertai dengan deklarasi

oleh pemberontak yang mengatakan bahwa Kashmir menjadi wilayah Pakistan. Akibatnya pemimpin Kashmir Maharaja Hari Singh pun meminta bantuan pemerintah India guna mengatasi para pemberontak. India pun meminta Maharaja Hari Singh untuk menandatangani *Instrument of Accession* yang berarti menyatakan bahwa Kashmir telah masuk ke wilayah India. Kemudian beliau menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Oktober 1947, sehingga Kashmir dinyatakan masuk ke wilayah India (Wibisono, 2017, p. 2). Tahun ini adalah tahun pertama Perang India-Pakistan pecah dan pada tanggal 1 Januari 1949 dinyatakan gencatan senjata yang diawasi oleh PBB (Wibisono, 2017, p. 28). Paska kejadian ini India dan Pakistan menjadi lebih sering terlibat konflik terutama untuk memperebutkan wilayah Kashmir. Perang kedua pecah pada tahun 1965 yang dimulai pada tanggal 5 Agustus dan berakhir pada tanggal 22 September. Perang ini ditandai dengan adanya Perjanjian Tashkent dan kedua belah pihak menyatakan bahwa dirinya menang (Wibisono, 2017, p. 29).

Kemudian perang yang ketiga terjadi pada tahun 1971. Namun bukan masalah Kashmir, melainkan masalah Pakistan Timur yang membuat wilayah ini menjadi negara Bangladesh. Pada waktu itu terjadi perselisihan antara pemerintah pusat Pakistan dengan penduduk Pakistan di wilayah timur. Adanya perselisihan di internal Pakistan membuat India turut ikut campur dan bahkan mengirimkan bantuan logistik kepada penduduk yang memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah pusat Pakistan. Bahkan India juga memberikan dukungan militer kepada penduduk Bengali untuk melawan pemerintah Pakistan. Perangpun berakhir dengan gencatan senjata pada Desember 1971 (Wibisono, 2017, p. 30).

Kemudian masalah Kashmir kembali muncul pada tahun 1999 yang diberi nama Perang Kirgil. Pada konflik ini tidak terjadi perang yang sebenarnya, namun akibat dari konflik ini sangat berpengaruh terhadap dunia internasional.

Pada konflik ini, kedua negara telah melakukan uji coba nuklir sebelum konflik ini terjadi. Sehingga ketika konflik ini terjadi kedua negara telah sama-sama siap dengan senjata nuklir yang dimiliki keduanya. Apabila sampai terjadi perang yang sesungguhnya, maka tidak hanya akan merugikan kedua negara namun juga masyarakat internasional. Perang ini diakhiri dengan gencatan senjata pada tanggal 11 Juli 1999 (Wibisono, 2017, p. 31).

Perang-perang tersebut adalah konflik India dan Pakistan yang cukup menegangkan. Akibat masalah perebutan wilayah tersebut, sampai saat ini India dan Pakistan tidak pernah akur. Kedua negara sering mengalami konflik-konflik kecil dan saling menaruh kecurigaan di antara keduanya. Keduanya juga saling mencari dukungan negara lain guna menambah kekuatan masing-masing. India dengan bantuan Amerika Serikat, Jepang dan sekutunya. Sedangkan Pakistan dengan China yang juga memiliki hubungan kurang harmonis dengan India.